



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

# 2024-2026



[dkpp.lumajangkab.go.id](http://dkpp.lumajangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan.

Dengan dirumuskan Renstra ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang bersiap diri untuk menyongsong kondisi masa depan melalui rancangan arahan yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang mulai tahun 2024 sampai 2026.

Renstra ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta stakeholder terkait dengan pembangunan pertanian. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama untuk maju dan mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi Kepala Daerah.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dalam penyelesaian Renstra ini. Saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Renstra ini.

Terima kasih.

Lumajang, Mei 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN



H. HAIRIL DIANI, M.Si

NIP. 19660922 199202 1 001

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.....	10
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ..	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	37
2.5 Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberian Pelayanan .....	37
2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	38
2.7 Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	38
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	39
3.2 Isu Strategis .....	40

IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	42
4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	44
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	59
VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	62
VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD .....	77
7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 .....	77
7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	79
VIII. PENUTUP .....	83

## DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.....	20
2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.....	20
2.3 Sarana/prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang .....	21
2.4 T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Panganda Pertanian .....	23
2.5 T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	31
3.1 T-B 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	39
4.1 T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	44
5.1 T-C 26 Tujuan, Strategi dan Kebijakan .....	60
6.1 TC 27 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	63
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	78
7.2 T-C 28. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD .....	80

## DAFTAR GAMBAR

<u>Tabel</u>		<u>Halaman</u>
1.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.....	11

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2018 – 2023 dan akhir periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2018 – 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang perlu disusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 Pasal 342 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Maka dengan adanya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Kabupaten Lumajang maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 -2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian untuk jangka waktu 3 tahun yang akan datang sebelum terpilih pemimpin daerah baru. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Dokumen RPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Transisi, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kabupaten Lumajang memiliki luas 179. 090 Ha atau 3,74% dari luas propinsi Jawa Timur. Luas total penggunaan lahan kabupaten

lumajang adalah 180.864,86 Ha dengan luas baku lahan sawah 36.372 Ha, terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut. serta kontribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2021\*\*\* sebesar (6.635 M) 34,31 %.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026 Kabupaten Lumajang dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan ketahanan pangan dan pertanian, meliputi bidang : Ketahanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan (PSP), Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 tahun ke depan sebelum terpilihnya pemimpin daerah yang baru dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 - 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang didasarkan pada berbagai aspek konstitusional sebagai berikut:

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - j. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- v. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- gg. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

- hh. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
- ii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2024-2026.
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- nn. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
- oo. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 karena berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah definitive di Tahun 2023 sehingga berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral).

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Transisi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten adalah :

1. Menetapkan Kebijakan Rencana Strategis yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Renja PD dan RKA PD selama masa transisi atau sampai dengan dilantiknya Bupati baru terpilih;
3. Mewujudkan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang disusun sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Memuat :

- 1.1. Latar belakang yang mengemukakan pengertian Renstra, fungsi, keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan RPD Kabupaten, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- 1.2. Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya.
- 1.3. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- 1.4. Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Memuat :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  - 2.1.1 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 2.1.2 Sekretaris Dinas
- 2.1.3 Kepala Bidang Ketahanan Pangan
- 2.1.4 Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- 2.1.5 Kepala Bidang Tanaman Pangan
- 2.1.6 Kepala Bidang Hortikultura
- 2.1.7 Kepala Bidang Perkebunan
- 2.1.8 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.2 Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  - 2.3.1 Indikator Kinerja Utama
  - 2.3.2 Kinerja Anggaran
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 2.5 Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 2.7 Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat :

- 3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 3.2 Isu Strategis

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

**Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja

**Bab VII KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Memuat :

- 7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- 7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

**Bab VIII PENUTUP**

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

Mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan dan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - (1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Sub. Koordinator.
3. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :

Sub Koordinator
4. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan membawahi :

Sub Koordinator
5. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

Sub Koordinator
6. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :

Sub Koordinator
7. Bidang Perkebunan, membawahi :

Sub Koordinator

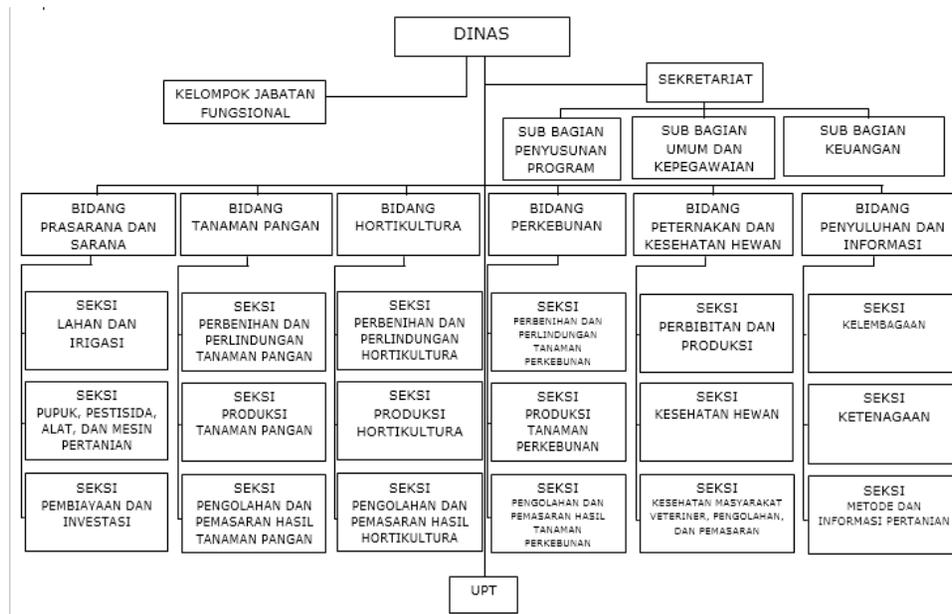
8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :

Sub Koordinator

9. Unit Pelaksana Teknis UPT;

10. Kelompok Jabatan Unit Pelaksana Teknis Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

### Penjabaran Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022, Struktur Organisasi tersebut di atas telah ditetapkan penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

#### 2.1.1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Tugas Pokok :

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan pertanian;

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, prasarana sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pembinaan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pembinaan produksi dan produktivitas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. pengembangan prasarana dan sarana bidang pangan dan pertanian;
- e. pengawasan penggunaan sarana bidang pangan dan pertanian;
- f. menjaga, melestarikan dan melindungi tingkat kesuburan lahan sebagaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;
- g. pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
- h. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- i. pembinaan produksi dan produktifitas di bidang pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pasca panen hasil pertanian;
- m. pemberian izin usaha dan/atau rekomendasi teknis bidang pangan dan pertanian;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Dinas;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Koordinator

### **2.1.3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan;
- d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- g. pengembangan sistem informasi pangan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Ketahanan Pangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.1.4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan**

Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, Sarana, dan Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- g. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- i. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
- j. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- a. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Prasarana membawahi Sub Koordinator.

### **2.1.5. Kepala Bidang Tanaman Pangan**

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

#### Fungsi Pokok:

- a. penyusunan kebijakan teknis perbenihan, teknologi budidaya, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- e. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman pangan;
- f. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- h. pelaksanaan pembinaan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan;
- i. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman pangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan mengenai Langkah dan Tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tanaman Pangan membawahi Sub Koordinator.

### **2.1.6. Kepala Bidang Hortikultura**

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Hortikultura.

#### Fungsi Pokok :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perbenihan, teknologi budidaya, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil hortikultura;
  - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
  - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
  - d. Pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - e. Penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman hortikultura;
  - f. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi hortikultura;
  - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman hortikultura;
  - h. Pelaksanaan pembinaan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil hortikultura;
  - i. Pelaksanaan penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman hortikultura;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan mengenai Langkah dan Tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas
- Kepala Bidang Hortikultura membawahi Sub Koordinator.

### **2.1.7. Kepala Bidang Perkebunan**

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

#### Fungsi Pokok :

- a. penyusunan kebijakan teknis perbenihan, teknologi budidaya, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- e. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman perkebunan;
- f. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan pembinaan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil perkebunan;
- i. pelaksanaan penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman perkebunan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan mengenai Langkah dan Tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas

Kepala Bidang Perkebunan membawahi Sub Koordinator.

### **2.1.8. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan pertanian.

#### Fungsi Pokok :

1. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
2. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
6. pengawasan obat hewan;
7. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
9. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
12. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
13. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi Sub Koordinator.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Dalam konteks pembangunan pertanian, ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah dan

sasaran organisasi mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam bentuk kegiatan. Begitu pula ketersediaan sumberdaya manusia aparatur ditingkat lapangan, harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah dirumuskan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya yang dimiliki seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

No	Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	12	8	20
2.	S-1	82	46	128
3.	D I /II	2	0	2
	D III	21	11	32
	D IV	3	-	3
4.	SMA	93	38	131
5.	SMP	23	-	23
6.	SD	25	1	26
	<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>104</b>	<b>365</b>

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Laki 2	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1	0	1
2.	Sekretaris	1	0	1
3.	Kepala Bidang	3	3	6
4.	Kasubbag	2	1	3
5.	Kepala Seksi	11	5	16
6.	Kepala UPT.	4	0	4
7.	Staf administrasi / Pelaksana	156	52	208
8.	Penyuluh pertanian	80	46	126
	<b>Total</b>	<b>263</b>	<b>113</b>	<b>365</b>

Tabel 2.3 Sarana/prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Lumajang

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang/Asset</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tanah	31 bidang
2.	Bangunan/Gedung	71 unit
2.	Peralatan	1197 unit
3.	Mesin (Mobil dan sepeda Motor)	144 unit
4.	Jaringan Irigasi, Dam Penahan	4 unit
5.	Jalan Usahatani/Jalan Produksi	-
6.	Rumah Potong Hewan	8 unit
7.	Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	4 unit
8.	Balai Penyuluhan pertanian (BPP)	21 unit

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

### **2.3.1 Indikator Kinerja Utama**

Adapun tujuan dari Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
2. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2018-2023, sebagaimana Tabel T-C 23, dibawah ini :

Tabel 2.4 TC 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1. Angka Stabilitas Harga Pangan				≤ 10%	≤ 10%	N/A	N/A	N/A	≤ 10%	≤ 10%	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	2 Jumlah Konsumsi Energi				1,996.40	1,997.30	N/A	N/A	N/A	1,996.40	1,997.20	N/A	N/A	N/A	100	99.99	N/A	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan ≤10Persentase				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase Jumlah Konsumsi Energi				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
2	Skor Pola Pangan Harapan				N/A	N/A	95.62	96,68	97,74	N/A	N/A	95.62	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan				N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Konsumsi Energi				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
3	Nilai PDRB Sektor Pertanian				6,761.80	6,829.40				6608.2	6611.9				97.73	96.82	N/A	N/A	N/A
	Persentase tingkat pemenuhan administrasi perkantoran				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Sayur Dan Buah Semusim				681117	681185	N/A	N/A	N/A	727714.79	582933.7	N/A	N/A	N/A	106.84	85.58	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Tanaman Buah Tahunan				1567079	1567235	N/A	N/A	N/A	1517625.37	1581712.01	N/A	N/A	N/A	96.84	100.92	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Sayur Dan Buah Semusim				203.39	203.41	N/A	N/A	N/A	193.4031426	93.87016103	N/A	N/A	N/A	95.09	46.15	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Tanaman Buah Tahunan				143.03	143.05	N/A	N/A	N/A	127.3341715	201.251794	N/A	N/A	N/A	89.03	140.69	N/A	N/A	N/A
	1. Persentase pemanfaatan alsintan				5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	2. Persentase peningkatan irigasi				5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	3. Jumlah lahan sawah yang terlindungi AUTP				100	4500	N/A	N/A	N/A	100	4500	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	4. Jumlah ternak sapi/kerbau betina yang terlindungi AUTS/K				100	750	N/A	N/A	N/A	98.2	750	N/A	N/A	N/A	98.20	100.00	N/A	N/A	N/A
	Persentase kenaikan skor kelas kelompok tani				1.5	2	N/A	N/A	N/A	1.5	2	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase peningkatan kompetensi penyuluh pertanian				1	5	N/A	N/A	N/A	1	2	N/A	N/A	N/A	100.00	40.00	N/A	N/A	N/A
	Persentase Peningkatan informasi pertanian yang dipublikasikan				1	2.7	N/A	N/A	N/A	1	2.7	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan				6742790.33	6742858.634	N/A	N/A	N/A	6944231.15	6136631.151	N/A	N/A	N/A	102.99	91.01	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan				61.08595903	61.08654462	N/A	N/A	N/A	59.43673203	59.2369005	N/A	N/A	N/A	97.30	96.97	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				100659.1066	100660.1132	N/A	N/A	N/A	100026	99695	N/A	N/A	N/A	99.37	99.04	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Tanaman Semusim				10787083	10788162	N/A	N/A	N/A	10929250	10930080	N/A	N/A	N/A	101.32	101.32	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Tanaman Tahunan				6.73	8.19	N/A	N/A	N/A	8.19	8.360167715	N/A	N/A	N/A	121.69	102.08	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Tanaman Semusim				753.17	753.31	N/A	N/A	N/A	760.29	777.6316913	N/A	N/A	N/A	100.95	103.23	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Ternak						N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
	1. Daging				22479634	22929227	N/A	N/A	N/A	22291744	19544629.72	N/A	N/A	N/A	99.16	85.24	N/A	N/A	N/A
	2. Telur				9790467	9986276	N/A	N/A	N/A	12004823	12460850.01	N/A	N/A	N/A	122.62	124.78	N/A	N/A	N/A
	3. Susu				13032717	13293372	N/A	N/A	N/A	13775263	14544893.7	N/A	N/A	N/A	105.70	109.41	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Populasi Ternak Besar				225532	230043	N/A	N/A	N/A	226284	235460	N/A	N/A	N/A	100.33	102.35	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Populasi Ternak Kecil				167321	170667	N/A	N/A	N/A	168764	180013	N/A	N/A	N/A	100.86	105.48	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Populasi Ternak Unggas				15636788	15949523	N/A	N/A	N/A	15271467	14805474	N/A	N/A	N/A	97.66	92.83	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah Produksi Tanaman Tembakau				8005	8006	N/A	N/A	N/A	8980.4	2028	N/A	N/A	N/A	112.18	25.33	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Tembakau				7.79	7.79	N/A	N/A	N/A	8.24	2.655840754	N/A	N/A	N/A	105.78	34.09	N/A	N/A	N/A
	Jumlah IB Kambing				5000	5100	N/A	N/A	N/A	3062	N/A	N/A	N/A	N/A	61.24	#VALUE!	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kelahiran Ternak				4800	4896	N/A	N/A	N/A	1224	N/A	N/A	N/A	N/A	25.50	#VALUE!	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produksi Tanaman Kopi				12677	N/A	N/A	N/A	N/A	12675.8	N/A	N/A	N/A	N/A	99.99	#VALUE!	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Produktivitas Tanaman Kopi				3.45	N/A	N/A	N/A	N/A	3.46	N/A	N/A	N/A	N/A	100.29	#VALUE!	N/A	N/A	N/A
4	Nilai PDRB Sub Sektor Pertanian				N/A	N/A	6,897.70	6,966.60	7,036.30	N/A	N/A	6634.5	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Jumlah produksi pertanian				N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
	- Tanaman Pangan				N/A	N/A	6,742,926	N/A	N/A	N/A	N/A	6735862	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	- Tanaman Buah				N/A	N/A	1,567,392	N/A	N/A	N/A	N/A	1767073	N/A	N/A	N/A	N/A	113	N/A	N/A
	- Tanaman Buah dan Sayur Semusim				N/A	N/A	681,253	N/A	N/A	N/A	N/A	603602	N/A	N/A	N/A	N/A	89	N/A	N/A
	- Tanaman Tahunan				N/A	N/A	100,661	N/A	N/A	N/A	N/A	98836	N/A	N/A	N/A	N/A	98	N/A	N/A
	- Tanaman Semusim				N/A	N/A	10,789,240	N/A	N/A	N/A	N/A	10928851	N/A	N/A	N/A	N/A	101	N/A	N/A
	- Produksi Ternak :				N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Daging				N/A	N/A	23,387,811	N/A	N/A	N/A	N/A	19732919	N/A	N/A	N/A	N/A	84	N/A	N/A
	- Telur				N/A	N/A	10,186,002	N/A	N/A	N/A	N/A	12652130	N/A	N/A	N/A	N/A	124	N/A	N/A
	- Susu				N/A	N/A	13,559,239	N/A	N/A	N/A	N/A	14962280	N/A	N/A	N/A	N/A	110	N/A	N/A
	- Populasi Ternak Besar				N/A	N/A	234,644	N/A	N/A	N/A	N/A	239975	N/A	N/A	N/A	N/A	102	N/A	N/A
	- Populasi Ternak Kecil				N/A	N/A	174,081	N/A	N/A	N/A	N/A	196160	N/A	N/A	N/A	N/A	113	N/A	N/A
	- Populasi Ternak Unggas				N/A	N/A	16,268,514	N/A	N/A	N/A	N/A	14642940	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A
	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian				N/A	N/A	250	N/A	N/A	N/A	N/A	250	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)				N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase pengurangan nilai kerugian				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian				N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
5	Skor Pola Pangan Harapan				N/A	N/A	N/A	96.68	97.74	N/A	N/A	N/A	95.3		N/A	N/A	N/A	99	
	Nilai PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan				N/A	N/A	N/A	1,981,818	2,080,909	N/A	N/A	N/A	1,681,763		N/A	N/A	N/A	85	
	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura				N/A	N/A	N/A	1,453,669	1,526,353	N/A	N/A	N/A	1,231,064		N/A	N/A	N/A	85	
	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan				N/A	N/A	N/A	1,997,285	2,097,149	N/A	N/A	N/A	1,883,124		N/A	N/A	N/A	94	

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan				N/A	N/A	N/A	1,759,200	1,847,160	N/A	N/A	N/A	1,635,747		N/A	N/A	N/A	93	
	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan				N/A	N/A	N/A	97,635	102,517	N/A	N/A	N/A	91,030		N/A	N/A	N/A	93	
	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	41.54	N/A	N/A	N/A	100	42
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi				N/A	N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	7		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	100	0
	Jumlah produksi pertanian																		
	- Tanaman Pangan				N/A	N/A	N/A	5,923,749	5,923,809	N/A	N/A	N/A	6479276.14	1,484,906	N/A	N/A	N/A	109	25
	- Tanaman Buah				N/A	N/A	N/A	1,581,759	1,581,807	N/A	N/A	N/A	1424963.07	296,967	N/A	N/A	N/A	90	19
	- Tanaman Buah dan Sayur Semusim				N/A	N/A	N/A	582,992	583,050	N/A	N/A	N/A	454366.43	24,409	N/A	N/A	N/A	78	4
	- Tanaman Tahunan				N/A	N/A	N/A	99,705	99,715	N/A	N/A	N/A	109782.554	23,421	N/A	N/A	N/A	110	23
	- Tanaman Semusim				N/A	N/A	N/A	10,931,173	10,932,266	N/A	N/A	N/A	11281025.47	-	N/A	N/A	N/A	103	0
	- Produksi Ternak :				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			A
	- Daging				N/A	N/A	N/A	19,935,522	20,334,233	N/A	N/A	N/A	19950878.45	4,874,107	N/A	N/A	N/A	100	24
	- Telur				N/A	N/A	N/A	12,523,154	12,773,617	N/A	N/A	N/A	12696050.89	3,204,501	N/A	N/A	N/A	101	25
	- Susu				N/A	N/A	N/A	14,835,792	15,132,507	N/A	N/A	N/A	12376260.17	2,866,763	N/A	N/A	N/A	83	19
	- Populasi Ternak Besar				N/A	N/A	N/A	240,169	244,973	N/A	N/A	N/A	209311	217,810	N/A	N/A	N/A	87	89
	- Populasi Ternak Kecil				N/A	N/A	N/A	183,613	187,286	N/A	N/A	N/A	187708	187,523	N/A	N/A	N/A	102	100
	- Populasi Ternak Unggas				N/A	N/A	N/A	14,894,307	15,192,193	N/A	N/A	N/A	14774076.47	6,070,956	N/A	N/A	N/A	99	40
	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart				N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)				N/A	N/A	N/A	90	90	N/A	N/A	N/A	90		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase pengurangan nilai kerugian				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan				N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	100	0
	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian				N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5		N/A	N/A	N/A	100	0

### **2.3.2 Kinerja Anggaran**

Kinerja anggaran pada perangkat daerah, diperoleh dari perbandingan antara target serapan dengan realisasi belanja.

Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), adapaun Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Ditinjau dari Alokasi / Pagu dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang berdasarkan data yang ada, terdapat pada *Tabel T-C 24* sebagai berikut :

Tabel 2.5 T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Angka Stabilitas Harga Pangan																	
2 Jumlah Konsumsi Energi																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	481,198,600	490,294,000	N/A	N/A	N/A	490,413,837	374,627,723	N/A	N/A	N/A	102	76	N/A	N/A	N/A	1.89	-23.61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197,720,000	388,535,000	N/A	N/A	N/A	262,480,050	77,894,700	N/A	N/A	N/A	133	20	N/A	N/A	N/A	96.51	-70.32
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12,550,000	34,189,800	N/A	N/A	N/A	16,689,430	1,595,400	N/A	N/A	N/A	133	5	N/A	N/A	N/A	172.43	-90.44
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	167,496,000	542,000,000	N/A	N/A	N/A	438,066,000	145,593,500	N/A	N/A	N/A	262	27	N/A	N/A	N/A	223.59	-66.76
Program Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN	410,346,600	636,412,000	N/A	N/A	N/A	510,912,600	194,607,100	N/A	N/A	N/A	125	31	N/A	N/A	N/A	55.09	-61.91
Skor Pola Pangan Harapan	N/A	N/A	95.62	96,68	97,74	N/A	N/A	95.62	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	N/A	N/A	2,312,255,833	N/A	N/A	N/A	N/A	1,747,973,159	N/A	N/A	N/A	N/A	75.59601036	N/A	N/A	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	N/A	N/A	110,388,500	N/A	N/A	N/A	N/A	273,232,300	N/A	N/A	N/A	N/A	247.5188086	N/A	N/A		0.00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	N/A	N/A	430,270,835	N/A	N/A	N/A	N/A	187,597,300	N/A	N/A	N/A	N/A	43.59981778	N/A	N/A		0.00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	N/A	N/A	386,035,835	N/A	N/A	N/A	N/A	169,610,800	N/A	N/A	N/A	N/A	43.93654283	N/A	N/A		0.00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	N/A	N/A	89,185,400	N/A	N/A	N/A	N/A	28,719,000	N/A	N/A	N/A	N/A	32.20145898	N/A	N/A		0.00
Nilai PDRB Sektor Pertanian	6,761.80	6,829.40	N/A	N/A	N/A	6608.2	6611.9	N/A	N/A	N/A	97.73	96.82	N/A	N/A	N/A		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	#####	3,896,364,570	N/A	N/A	N/A	2,377,343,120	2,025,693,736	N/A	N/A	N/A	97.37	51.99	N/A	N/A	N/A	59.58	-14.79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	#####	4,451,243,940	N/A	N/A	N/A	2,471,398,153	537,469,996	N/A	N/A	N/A	88.60	12.07	N/A	N/A	N/A	59.58	-78.25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelporan	38,328,000	61,164,993	N/A	N/A	N/A	59,728,000	30,779,000	N/A	N/A	N/A	155.83	50.32	N/A	N/A	N/A	59.58	-48.47

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	#####	3,033,108,266	N/A	N/A	N/A	1,447,376,982	702,697,760	N/A	N/A	N/A	76.15	23.17	N/A	N/A	N/A	59.58	-51.45
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	#####	#####	N/A	N/A	N/A	6,394,184,352	1,470,029,500	N/A	N/A	N/A	89.96	12.96	N/A	N/A	N/A	59.58	-77.01
Program Peningkatan SDM dan Informasi Pertanian	986,918,000	1,574,953,870	N/A	N/A	N/A	973,518,000	1,272,411,200	N/A	N/A	N/A	98.64	80.79	N/A	N/A	N/A	59.58	30.70
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	925,900,800	1,477,580,760	N/A	N/A	N/A	885,005,200	646,502,100	N/A	N/A	N/A	95.58	43.75	N/A	N/A	N/A	59.58	-26.95
Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman perkebunan	897,053,300	1,431,545,039	N/A	N/A	N/A	863,835,300	126,062,500	N/A	N/A	N/A	96.30	8.81	N/A	N/A	N/A	59.58	-85.41
Program peningkatan produksi dan nilai tambah peternakan dan kesehatan hewan	#####	5,165,816,555	N/A	N/A	N/A	3,059,772,150	3,083,922,155	N/A	N/A	N/A	94.52	59.70	N/A	N/A	N/A	59.58	0.79
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	#####	2,952,286,472	N/A	N/A	N/A	1,722,074,750	1,748,460,400	N/A	N/A	N/A	88.45	59.22	N/A	N/A	N/A	51.63	1.53
Program Pembinaan Lingkungan	450,000,000	165,000,000	N/A	N/A	N/A	436,891,300	955,056,740	N/A	N/A	N/A	97.09	578.82	N/A	N/A	N/A	-63.33	118.60

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sosial																	
Nilai PDRB Sub Sektor Pertanian	N/A	N/A	6,897.70	6,966.60	7,036.30	N/A	N/A	6634.5	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	18,412,133,000	N/A	N/A	N/A	N/A	14,677,287,118	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (sarana : alsintan dan saprodi)	N/A	N/A	7,919,385,353	N/A	N/A	N/A	N/A	5,776,347,878	N/A	N/A	N/A	N/A	73	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	N/A	N/A	11,999,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	8,190,039,900	N/A	N/A	N/A	N/A	68	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	N/A	N/A	3,756,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	714,804,400	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	N/A	N/A	2,513,622,700	N/A	N/A	N/A	N/A	230,792,500	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	N/A	N/A	579,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	61,200,000	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	0.00	0.00
PROGRAM	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	53	N/A	N/A	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENYULUHAN PERTANIAN			2,938,692,000					1,548,519,827						A	A		
Skor Pola Pangan Harapan	N/A	N/A	N/A	96.68	97.74	N/A	N/A	N/A	95.3	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A
Nilai PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	N/A	N/A	N/A	1,981,818	2,080,909	N/A	N/A	N/A	1,681,763	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A
Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura	N/A	N/A	N/A	1,453,669	1,526,353	N/A	N/A	N/A	1,231,064	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A
Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan	N/A	N/A	N/A	1,997,285	2,097,149	N/A	N/A	N/A	1,883,124	N/A	N/A	N/A	N/A	94	N/A	N/A	N/A
Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan	N/A	N/A	N/A	1,759,200	1,847,160	N/A	N/A	N/A	1,635,747	N/A	N/A	N/A	N/A	93	N/A	N/A	N/A
Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	N/A	N/A	N/A	97,635	102,517	N/A	N/A	N/A	91,030	N/A	N/A	N/A	N/A	93	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	N/A	20,986,102,833	16,404,490,497	N/A	N/A	N/A	15,513,481,823	3699977072	N/A	N/A	N/A	74	23	-21.83	-76.15
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	N/A	N/A	N/A	3,999,461,000	3,999,461,000	N/A	N/A	N/A	3,999,693,700		N/A	N/A	N/A	100	0	0.00	-100.00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	N/A	N/A	N/A	276,000,000	276,000,000	N/A	N/A	N/A	300,510,000	64800000	N/A	N/A	N/A	109	23	0.00	-78.44

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PANGAN MASYARAKAT																	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	N/A	N/A	N/A	-	49,368,000	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	0	0	0.00	0.00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	N/A	N/A	N/A	43,200,000	51,200,000	N/A	N/A	N/A	43,200,000		N/A	N/A	N/A	100	0	18.52	-100.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	N/A	N/A	N/A	5,753,931,722	5,753,931,722	N/A	N/A	N/A	4,646,586,880	333,200,000	N/A	N/A	N/A			0.00	-92.83
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	N/A	N/A	N/A	3,795,821,014	3,795,821,014	N/A	N/A	N/A	5,499,197,400	21,300,000	N/A	N/A	N/A	145	1	0.00	-99.61
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	N/A	N/A	N/A	984,000,000	984,000,000	N/A	N/A	N/A	1,932,019,645	171,000,000	N/A	N/A	N/A	196	17	0.00	-91.15
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	N/A	N/A	N/A	100,000,000	100,000,000	N/A	N/A	N/A	93,710,916		N/A	N/A	N/A	94	0	0.00	-100.00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	N/A	N/A	N/A	106,800,000	106,800,000	N/A	N/A	N/A	89,000,000	21,600,000	N/A	N/A	N/A	83	20	0.00	-75.73
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	N/A	N/A	N/A	2,272,125,000	2,272,125,000	N/A	N/A	N/A	2,432,979,409	10,800,000	N/A	N/A	N/A	107	0	0.00	-99.56

## **2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Kelompok Tani yang sampai dengan tahun 2022 berjumlah sebanyak 1.138 kelompok di Kabupaten Lumajang.

Layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Lumajang terhadap Kelompok Tani diantaranya :

1. Pelatihan budidaya tanaman;
2. Pemberian bantuan benih/bibit
3. Pemberian bantuan pupuk
4. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian
5. Perlindungan AUTP dan AUTSK
6. Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT

## **2.5 Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pemberian pelayanan diantaranya :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan DPMPTSP terkait informasi LP2B;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan DPKP terkait perizinan SITE PLAN Perumahan;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan BAPPEDA terkait Komisi Irigasi;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan DPUTR terkait pembinaan HIPPA;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan DLH terkait UKLUPL;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan DPMD terkait BUMDES;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan BPS terkait Data Statistik Pertanian;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan BPN terkait LSD;

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan INSPEKTORAT terkait pembinaan Perangkat Daerah;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bermitra dengan DKOMINFO terkait pelayanan publikasi Perangkat Daerah;

## **2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian diantaranya PD SEMERU terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pemasaran Beras Organik.

## **2.7 Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dilakukan dari 2018 sampai dengan tahun 2022 yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan PT.LESOS terkait sertifikasi organik beberapa komoditas pertanian (pisang, kopi, padi dan salak);

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal serta ancaman yang belum diantisipasi. Adapun permasalahan di bidang pertanian yang dapat diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel T-B 35, sebagai berikut :

Tabel 3.1 T-B 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekonomi bertumpu pada sektor pertanian dan industri (kontribusi terbesar pada PDRB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas prasarana dan sarana pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Infrastruktur kemandirin pangan yang belum optimal.</li> <li>2. Kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart yang belum optimal.</li> <li>3. Kurang optimalnya keamanan pangan asal hewan</li> <li>4. Masih tingginya angka kerugian</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>yang disebabkan oleh bencana alam</p> <p>5. Kurangnya SDM dan Informasi Pertanian</p> <p>6. Belum optimalnya kerjasama/kemitraan sector pertanian</p>

### 3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis nasional saat ini adalah terkait Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan bagian penting pembangunan nasional Indonesia. Hal ini mengindikasikan akan pentingnya keberlanjutan dalam pencapaian ketahanan pangan dan energi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi berikhtiar memperkuat ketahanan pangan Indonesia, baik di bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan, dengan berfokus pada tiga hal: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Sedangkan isu Regional Jawa Timur adalah terkait Ketahanan Pangan mengingat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Banyak komoditas pangan strategis tersedia dan berhasil di produksi dengan baik di Jawa Timur. Komoditas tersebut seperti, gula, telur, beras, daging ayam, daging ruminansia, jagung, serta berbagai pangan lokal lainnya.

Untuk komoditas beras, berdasarkan kebutuhan beras nasional sebanyak 30 juta ton per tahun, sepertiganya dipenuhi dari Jawa Timur. Begitu juga telur, Kabupaten Blitar memasok 30 persen kebutuhan telur nasional. Karena surplus produksi pangan yang ada di Jawa Timur ini bisa melimpah ke daerah-daerah konsumsi lainnya sampai ke 16

provinsi. Karena itu, langkah-langkah pengembangan dan penguatan pangan ke depan, termasuk bagaimana menjaga kesetimbangan harga antara hulu dan hilir penting untuk dilakukan.

Sedangkan isu Kabupaten Lumajang saat ini salah satunya adalah terkait Perekonomian Kabupaten Lumajang tahun 2021 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Sektor Pertanian masih mendominasi dalam berkontribusi sebesar 34,59 persen terhadap PDRB Kabupaten Lumajang.

Meskipun Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumber daya yang cukup potensial di bidang pertanian, tetapi tingkat penerapan teknologi relatif terbatas. Hal ini menyebabkan produktivitas sektor ini tumbuh lambat. Karena itu, upaya komprehensif untuk meningkatkan produktivitas pertanian harus menjadi perhatian ke depannya.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, yang meliputi identifikasi permasalahan, Telaah Visi, Misi, Program, Telaah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Propinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS maka dapat ditentukan isu strategisnya yaitu Ekonomi wilayah masih bertumpu pada sektor pertanian.

Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya disebabkan oleh fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian sebagai salah satu sektor dominan. Di sektor pertanian, sarana dan prasarana penunjang pertanian masih belum optimal, sehingga berimplikasi pada masih belum optimalnya produksi serta pemasaran hasil produksi pertanian. Hal ini menyebabkan terhambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui komoditas pertanian.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang adalah : **Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan industri**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria **"SMART"**, yaitu *Specific* (khusus), *Measureable* (terukur), *attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu).

Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Nilai Skor Pola Pangan Harapan
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
3. Peningkatan Produksi Hortikultura.
4. Peningkatan Produksi Perkebunan.
5. Peningkatan Produksi Peternakan.

Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah RPD Kabupaten. Adapun konsistensi tersebut dapat dijabarkan dalam matriks berikut ini :

**Tabel 4.1 T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri		Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	Data BPS	6,686.83	6,712.45	6,738.06
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Data Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Susenas BPS	95.49	95.68	95.87
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	0.002	0.003	0.004
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	0.003	0.0045	0.006
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	0.02	0.03	0.04
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	0.04	0.06	0.08

## 4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri		Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	Data BPS
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Data Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Susenas BPS
2:09:02	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan</b>	%	$\sum$ infrastruktur lumbung pangan yang dibangun tahun N ditambah jumlah infrastruktur lumbung pangan s.d N-1 dibagi jumlah kebutuhan infrastruktur lumbung pangan dikali 100
02.09.02.201	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase wilayah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	%	$\sum$ wilayah infrastruktur lumbung pangan yang dibangun dibagi wilayah infrastruktur lumbung pangan yang direncanakan dikali 100
02.09.02.201.01	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	$\sum$ Lumbung pangan yang dibangun
02.09.02.201.02	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	unit	$\sum$ Lantai Jemur yang dibangun
02.09.02.201.03	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	$\sum$ Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan (Rumah dan Mesin RMU) yang disediakan
02.09.02.201.04	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	laporan	$\sum$ Lumbung Pangan Mandiri yang difasilitasi

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Infrastruktur Logistik		Infrastruktur Logistik		
2:09:03	Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Nilai Angka Kecukupan Energi</b>	kkal per kapita per hari	$\Sigma$ Nilai Angka Kecukupan Energi (data Susenas BPS)
02.09.03.201	Meningkatnya fasilitas Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang difasilitasi	%	(jumlah laporan penyediaan yang dibuat dibagi jumlah laporan penyediaan yang direncanakan dikali 100) ditambah (jumlah unit lumbung dan lembaga penggilingan gabah yang di fasilitasi dibagi unit lumbung dan lembaga penggilingan gabah yang direncanakan) dibagi jumlah variabel
Catatan : Variabel untuk penyebut meliputi laporan, unit lembaga, dan keluarga. Variabel dihitung apabila dilaksanakan					
02.09.03.201.01	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	$\Sigma$ Laporan Harga pangan dan Neraca Bahab Makanan yang tersedia
02.09.03.201.03	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	$\Sigma$ Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok yang disusun
02.09.03.201.04	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	$\Sigma$ dokumen pemantauan stok pasokan dan harga pangan yang disusun
02.09.03.201.05	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	unit	$\Sigma$ Lumbung pangan dan Lembaga Penggilingan Gabah yang dikembangkan
02.09.03.202	<b>Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Pangan</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah fasilitas kebutuhan cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pemenuhan cadangan pangan tahun N dikali 100</b>
02.09.03.202.01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	$\Sigma$ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan yang dibuat
02.09.03.202.02	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	dokumen	$\Sigma$ dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal yang dibuat

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Lokal	Lokal			
02.09.03.20 2.03	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	ton	$\Sigma$ cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
02.09.03.20 4	Meningkatnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan	%	jumlah realisasi konsumsi pangan perkapita pertahun (BPS) dibagi jumlah target konsumsi pangan perkapita per tahun (DKPP) dikali 100
02.09.03.20 4.01	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	$\Sigma$ dokumen target konsumsi pangan per kapita per tahun
02.09.03.20 4.02	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	$\Sigma$ kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
02.09.03.20 4.03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	$\Sigma$ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun yang dibuat
2:09:04	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	Jumlah penanganan wilayah cukup rentan, rentan dan sangat rentan rawan pangan dibagi jumlah wilayah wilayah cukup rentan, rentan dan sangat rentan rawan pangan dikali 100
02.09.04.20 1	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase peta ketrentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	%	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun di bagi jumlah kebutuhan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
02.09.04.20 1.01	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan KerentananPangan yang Dimutakhirkan	dokumen	$\Sigma$ dokumen peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan
02.09.04.20	Meningkatnya	Penanganan	Persentase penanganan	%	jumlah fasilitasi penanganan kerawanan pangan dibagi jumlah penanganan kerawanan pangan yang direncanakan dikali 100

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kerawanan Pangan yang terfasilitasi		
02.09.04.20 2.01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	$\Sigma$ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
02.09.04.20 2.02	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	$\Sigma$ Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
02.09.05	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	%	Jumlah sample pangan segar asal tumbuhan yang aman di bagi jumlah sample pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa dikali 100
02.09.05.20 1	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Persentase fasilitas pengawasan Keamanan Pangan Segar	%	Jumlah ijin edar yang terbit dibagi jumlah ijin edar yang di ajukan dikali 100
02.09.05.20 1.01	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	$\Sigma$ dokumen hasil penguatan kelembagaan Keamanan Pangan Segar yang dibuat
02.09.05.20 1.03	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	$\Sigma$ dokumen Registrasi terbit dan dokumen pengawasa Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
02.09.05.20 1.05	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jenis	$\Sigma$ Jenis Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan PSAT
	<b>Meningkatnya</b>		Persentase	<b>%</b>	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Produksi Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100
3:27:02	Meningkatnya kualitas dan penyediaan Sarana Pertanian	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase peningkatan penyediaan Sarana Pertanian	%	<b>(Jumlah penyediaan alsintan s.d tahun N) dikurangi ( jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022) dibagi jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022 dikali 100</b>
			Persentase peningkatan varietas baru bersertifikat	%	<b>Jumlah varietas baru bersertifikat s.d tahun N dibagi jumlah varietas baru bersertifikat yang ditargetkan dikali 100</b>
03.27.02.02 1	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dibuat</b>	%	<b>Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dibagi kegiatan pengawasan yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.02.02 1.01	Terawasanya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	$\Sigma$ Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi yang dibuat
03.27.02.02 1.02	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	$\Sigma$ Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dibuat
03.27.02.02 2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi pengelolaan SDG yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pengelolaan SDG yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.02.02 2.01	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	$\Sigma$ Varietas Unggulan Baru (VUB) yang dilepas
03.27.02.02	Meningkatnya Kualitas	Peningkatan Kualitas	Jumlah Pelaksanaan	dokume	$\Sigma$ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG)

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
2.02	SDG Hewan/Tanaman	SDG Hewan/ Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	n	Hewan/Tanaman
03.27.02.023	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan yang dilaksanakan</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi peningkatan mutu dan peredaran yang dilaksanakan dibagi fasilitasi peningkatan mutu yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.02.023.01	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
03.27.02.023.02	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan , Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan , Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar
03.27.02.025	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak dan HPT</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan dibagi fasilitasi pengendalian dan pengawasan yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.02.025.01	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	$\sum$ Benih / Bibit Ternak kambing yang beredar
03.27.02.025.02	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	dokumen	$\sum$ dokumen Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
03.27.02.025.03	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor	$\sum$ Ternak Sapi dan kerbau yang terfasilitasi penandaan
03.27.02.025.06	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	$\sum$ Laporan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
03.27.02.02	Terlaksananya	Penyediaan Benih/Bibit	Persentase benih/bibit	%	<b>Jumlah benih bibit ternak dan HMT yang didistribusikan dibagi jumlah benih bibit ternak dan HMT yang direncanakan dikali 100</b>

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	ternak dan hijauan pakan ternak yang didistribusikan		
03.27.02.02 6.01	Terlaksananya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain
03.27.02.02 6.02	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ton	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain
3:27:03	Meningkatnya kualitas Prasarana Pertanian	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun</b>	%	<b>(jumlah prasarana yang dibangun sampai dengan tahun N) dikurangi (Jumlah prasarana s.d 2022) dibagi Jumlah prasarana s.d 2022 (792)</b>
03.27.03.20 1	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang difasilitasi</b>	%	<b>jumlah prasarana pertanian yang difasilitasi dibagi jumlah prasarana pertanian yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.03.20 1.01	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	∑ dokumen rekomendasi LP2B yang diterbitkan
03.27.03.20 1.03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	∑ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
03.27.03.20 1.04	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	dokumen	∑ dokumen Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan yang dibuat

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
03.27.03.20 2	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun / direhab</b>	%	<b>Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun dan direhab dibagi jumlah prasarana pertanian yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.03.20 2.01	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi Usaha tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Jaringan Irigasi yang dibangun
03.27.03.20 2.02	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Embung pertanian yang dibangun
03.27.03.20 2.03	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Jalan Usaha Tani yang dibangun
03.27.03.20 2.04	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Dam Parit yang dibangun
03.27.03.20 2.06	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Pintu Air yang dibangun
03.27.03.20 2.07	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Rumah Potomng Hewan (RPH ) yang direhab
03.27.03.20 2.08	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	$\Sigma$ Balai Penyuluh Pertanian (BPP ) yang direhab
03.27.03.20 2.09	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	$\Sigma$ Puskesmas yang direhab
3:27:04	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu,</b>	%	<b>Jumlah hasil pemeriksaan produksi ternak yang aman konsumsi dibagi jmlah produksi ternak yang diperiksa dikali 100</b>

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Veteriner	<b>DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	telur)		
03.27.04.201	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi pengobatan ternak dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.04.201.01	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
03.27.04.203	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan</b>	%	<b>Jumah laporan pelayanan jasa medik yang difasilitasi dibagi Jumah laporan pelayanan jasa medik yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.04.203.02	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	$\Sigma$ Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berbasis UPT Puskesmas yang dibuat
03.27.04.204	Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	%	<b>Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesmavet yang difasilitasi dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.04.204.01	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	$\Sigma$ Laporan hasil pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan yang dibuat
03.27.04.204.02	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	$\Sigma$ Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewanyang dibuat
03.27.04.204.04	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	$\Sigma$ Laporan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterineryang dibuat
03.27.04.205	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis</b>	<b>Persentase Pengawasan Unit Usaha Kesrawan</b>	%	<b>Jumlah unit usaha kesrawan (RPH) yang diawasi dibagi jumlah unit usaha kesrawan yang ada dikali 100</b>

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kesejahteraan Hewan			
03.27.04.20 5.01	Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	$\sum$ Laporan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan yang dibuat
3:27:05	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Luasan serangan OPT dan bencana pertanian yang ditangani</b>	%	<b>(Jumlah luasan seranagn organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang ditangani) ditambah (jumlah luasan bencana pertanian yang ditangani) dibagi (jumlah luasan serangan OPT) ditambah (luasan bencana pertanian) dikali 100</b>
03.27.05.20 1	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupten	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan</b>	%	<b>Jumlah Luasan serangan OPT yang difasilitasi dibagi jumlah luasan serangan OPT dikali 100</b>
03.27.05.20 1.01	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	$\sum$ Luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT ) yang difasilitasi
03.27.05.20 1.05	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	$\sum$ Laporan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3:27:07	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian</b>	%	<b>((Jumlah kelompok tani yang naik kelas s.d tahun N dibagi jumlah poktan data awal 2022 dikali 100) ditambah (Jumlah PPL yang naik kelas s.d tahun N dibagi jumlah PPL data awal dikali 100)) dibagi 2</b>
03.27.07.20 1	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan</b>	%	<b>Jumlah Fasilitasi penyuluhan pertanian dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan dikali 100</b>
03.27.07.20 1.01	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	$\sum$ Kelembagaan Penyuluhan (BPP) yang difasilitasi
03.27.07.20	Terlaksananya	Pengembangan	Jumlah Kelembagaan	Unit	$\sum$ Kelembagaan Petani yang difasilitasi

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
03.27.07.20 1.03	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	$\Sigma$ fasilitasi Sarana dan prasarana penyuluhan
03.27.07.20 1.05	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	$\Sigma$ Sekolah Lapang yang terfasilitasi
1:09:01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100</b>
01.09.01.20 1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100</b>
01.09.01.20 1.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	$\Sigma$ dokumen dokumen Renstra, dokumen P Renstra, dokumen Renja, dokumen P Renja
01.09.01.20 1.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	$\Sigma$ dokumen RKA SKPD
01.09.01.20 1.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	$\Sigma$ dokumen Perubahan RKA SKPD, dokumen Pergeseran RKA SKPD
01.09.01.20 1.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	laporan	$\Sigma$ Laporan LKjIP Tahunan, Laporan LKjIP TW I, Laporan LKjIP TW II, Laporan LKjIP TW III, Laporan LKjIP TW IV

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
01.09.01.20 1.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	$\sum$ Laporan Evaluasi Renja TW 1, TW II, TW III, TW IV/Laporan Evaluasi Interim TW I, II,III,IV/Laporan IKM TW I, TW II, TW III, TW IV/LaporanEvaluasi DAK TW I, II, III, IV/Laporan Evaluasi DBHCHT I,II,III,IV/
01.09.01.20 2	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi keuangan yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 2.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	$\sum$ ASN yang mendapat Gaji dan tunjangan Bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei Juni, Juli Agt, Sep, Okt, Nop, Des
01.09.01.20 2.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	$\sum$ dokumen pelaksanaan tugas ASN Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,
01.09.01.20 2.05	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	$\sum$ Laporan Keuangan Perangkat Daerah
01.09.01.20 2.07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	$\sum$ Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester
01.09.01.20 3	Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	%	Jumlah fasilitasi administrasi BMD yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi BMD yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 3.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	$\sum$ dokumen RKBMD, dokumen RKBMD Perubahan
01.09.01.20	Terlaksananya	Pengamanan Barang	Jumlah dokumen	dokumen	$\sum$ dokumen pengamanan barang milik daerah

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Milik Daerah	pengamanan barang milik daerah SKPD	n	
01.09.01.20 3.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	$\Sigma$ Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember
01.09.01.20 5	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD</b>	%	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 5.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	$\Sigma$ paket pakaian dinas
01.09.01.20 5.03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	$\Sigma$ dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,
01.09.01.20 6	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Umum PD</b>	%	Jumlah fasilitas administrasi umum yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 6.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	$\Sigma$ Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01.09.01.20 6.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	$\Sigma$ Paket penyediaan logistik Kantor (bahan dan peralatan)
01.09.01.20 6.05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	$\Sigma$ Paket Penyediaan barang cetakan serta proses penggandaan
01.09.01.20 6.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	$\Sigma$ Penyediaan bahan bacaan
01.09.01.20 6.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	$\Sigma$ Paket Penyediaan bahan/material lainnya
01.09.01.20	Terlaksananya Fasilitas	Fasilitas Kunjungan	Jumlah Laporan	Laporan	$\Sigma$ Laporan fasilitas penerimaan kunjungan tamu

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
6.08	Kunjungan Tamu	Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu		
01.09.01.20 6.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	$\Sigma$ Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi
01.09.01.20 7	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pengadaan BMD</b>	%	Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang terpenuhi di bagi Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 7.10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	$\Sigma$ unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
01.09.01.20 8	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	%	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 8.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	$\Sigma$ Laporan penyediaan jasa surat menyurat bulan januari sd Desember
01.09.01.20 8.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	$\Sigma$ Laporan penyediaan jasa telepon/internet, air, listrik bulan Januari sd Desember
01.09.01.20 8.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	$\Sigma$ Laporan fasilitas jasa pelayanan umum kantor
01.09.01.20 9	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	%	Jumlah fasilitas pemeliharaan BMD yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas pemeliharaan BMD yang direncanakan dikali 100
01.09.01.20 9.01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	unit	$\Sigma$ pemeliharaan dan rehabilitasi unit kendaraan dinas perorangan/jabatan (termasuk di dalamnya jasa perizinan kendaraan)

Kode	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
	Dinas Jabatan	Dinas Jabatan	Pajaknya		
01.09.01.20 9.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	$\Sigma$ pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan dinasoperasional/lapangan (termasuk di dalamnya jasa perizinan kendaraan)
01.09.01.20 9.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	$\Sigma$ pemeliharaan peralatan dan peralatan mesin lainnya, termasuk yang digunakan dli kantor dan rumah dinas/jabatan (contoh
01.09.01.20 9.08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	$\Sigma$ pemeliharaan aset tak berwujud
01.09.01.20 9.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	$\Sigma$ pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor/bangunan lain, termasuk rumah dinas

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi Kepala Daerah tujuan dan sasaran SKPD, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyusunan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, didahului dengan identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yakni dari lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisa pohon masalah dengan memperhatikan beberapa isu strategis yang berkembang. Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif, yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan maka strategi dan arah kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 2024 – 2026, sebagaimana Tabel T-C 26 berikut :

**Tabel 5.1 T-C 26 Tujuan, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Meningkatkan ketahanan pangan antara lain melalui peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1. Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
	2. Meningkatnya produksi pertanian	2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan cara meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pertanian	2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertaniansektor pertanian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kebijakan didefinisikan sebagai arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan menggambarkan keterkaitan antara bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Untuk itu diperlukan kebijakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar dapat merangkaikan program di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen yang kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa.

Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Periode Tahun 2024-2026 terdapat pada Tabel T-C 27, sebagai berikut

Tabel 6.1 TC-27 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						0		Rp 33,337,518,8 14		Rp 39,517,087,1 61		Rp 41,112,695,8 77				
2:09:02	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan</b>	%	$\Sigma$ infrastruktur lumbung pangan yang dibangun tahun N ditambah jumlah infrastruktur lumbung pangan s.d N-1 dibagi jumlah kebutuhan infrastruktur lumbung pangan dikali 100	<b>31.31</b>	31.82	933,500,000	32.32	1,026,850,000	32.83	1,129,535,000	32.83	3,089,885,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.02.201	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase wilayah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	%	$\Sigma$ wilayah infrastruktur lumbung pangan yang dibangun dibagi wilayah infrastruktur lumbung pangan yang direncanakan dikali 100	100	100	933,500,000	100	1,026,850,000	100	1,129,535,000	100	3,089,885,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.02.201.01	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	$\Sigma$ Lumbung pangan yang dibangun	4	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	3	910,250,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.02.201.02	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	unit	$\Sigma$ Lantai Jemur yang dibangun	4	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	3	248,250,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.02.201.03	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	$\Sigma$ Infrastruktur kemandirian pangan (Rumah dan Mesin RMU) yang disediakan	4	1	437,500,000	1	481,250,000	1	529,375,000	3	1,448,125,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.02.201.04	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	laporan	$\Sigma$ Lumbung Pangan Mandiri yang difasilitasi	58	62	146,000,000	66	160,600,000	70	176,660,000	198	483,260,000	Bidang Ketahanan Pangan	
2:09:03	Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Nilai Angka Kecukupan Energi</b>	kcal per kapita per hari	$\Sigma$ Nilai Angka Kecukupan Energi (data Susenas BPS)	<b>2112.00</b>	2,122.56	280,510,000	2,133.12	198,561,000	2,143.68	1,418,417,100	2,143.68	1,897,488,100	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.201	Meningkatnya fasilitasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang difasilitasi	%	(jumlah laporan penyediaan yang dibuat dibagi jumlah laporan penyediaan yang direncanakan dikali 100) ditambah (jumlah unit lumbung dan lembaga penggilingan gabah yang difasilitasi dibagi unit lumbung dan lembaga penggilingan gabah yang direncanakan) dibagi jumlah variabel	100	100	90,510,000	100	99,561,000	100	109,517,100	100	299,588,100	Bidang Ketahanan Pangan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Catatan : Variabe untuk penyebut meliputi laporan, unit lembaga, dan keluarga. Variabel dihitung apabila dilaksanakan											
02.09.03.201. 01	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	$\Sigma$ Laporan Harga pangan dan Neraca Bahab Makanan yang tersedia	18	18	6,000,000	18	6,600,000	18	7,260,000	54	19,860,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.201. 03	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	$\Sigma$ Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok yang disusun	5	5	15,000,000	5	16,500,000	5	18,150,000	15	49,650,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.201. 04	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	$\Sigma$ dokumen pemantauan stok pasokan dan harga pangan yang disusun	12	12	9,510,000	12	10,461,000	12	11,507,100	36	31,478,100	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.201. 05	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	unit	$\Sigma$ Lumbung pangan dan Lembaga Penggilingan Gabah yang dikembangkan	N/A	20	60,000,000	30	66,000,000	40	72,600,000	90	198,600,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.202	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Pangan	%	Jumlah fasilitas kebutuhan cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pemenuhan cadangan pangan tahun N dikali 100	100	100	110,000,000	100	11,000,000	100	1,212,100,00 0	300	1,333,100,00 0	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.202. 01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengan dalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	$\Sigma$ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan yang dibuat	6	6	10,000,000	6	11,000,000	6	12,100,000	18	33,100,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.202. 02	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	dokumen	$\Sigma$ dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal yang dibuat	N/A	1	100,000,000				-	1	100,000,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.202. 03	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	ton	$\Sigma$ cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	N/A					100	1,200,000,00 0	100	1,200,000,00 0	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.204	Meningkatnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan	%	jumlah realisasi pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita pertahun (BPS) dibagi jumlah target konsumsi pangan perkapita per tahun (DKPP) dikali 100	100	100	80,000,000	100	88,000,000	100	96,800,000	100	264,800,000		
02.09.03.204. 01	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	$\Sigma$ dokumen target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	0	-	1	-	1	-	2	-	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.03.204. 02	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman	laporan	$\Sigma$ kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	8	2	80,000,000	3	88,000,000	3	96,800,000	8	264,800,000	Bidang Ketahanan Pangan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sumber Daya Lokal	Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
02.09.03.204. 03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	∑ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun yang dibuat	1	0	-	1	-	1	-	2	-	Bidang Ketahanan Pangan	
2:09:04	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	Jumlah penanganan wilayah cukup rentan, rentan dan sangat rantan rawan pangan dibagi jumlah wilayah wilayah cukup rentan, rentan dan sangat rantan rawan pangan dikali 100	100	100	70,000,000	100	96,000,000	100	97,600,000	100	263,600,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.04.201	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase peta ketrentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	%	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun di bagi jumlah kebutuhan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	300	165,500,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.04.201. 01	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	∑ dokumen peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	3	165,500,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.04.202	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan Kerawanan Pangan yang terfasilitasi	%	jumlah fasilitasi penanganan kerawanan pangan dibagi jumlah penanganan kerawanan pangan yang direncanakan dikali 100	N/A	100	20,000,000	100	41,000,000	100	37,100,000	300	98,100,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.04.202. 01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	∑ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	N/A	2	10,000,000	10	11,000,000	5	12,100,000	17	33,100,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.04.202. 02	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	∑ Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	1	10,000,000	2	30,000,000	1	25,000,000	4	65,000,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.05	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang	%	Jumlah sample pangan segar asal tumbuhan	100	100	88,200,000	100	97,020,000	100	106,722,000	100	291,942,000	Bidang Ketahanan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			aman		yang aman di bagi jumlah sample pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa dikali 100										Pangan	
02.09.05.201	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Persentase fasilitasi pengawasan Keamanan Pangan Segar	%	Jumlah ijin edar yang terbit dibagi jumlah ijin edar yang di ajukan dikali 100	100	100	88,200,000	100	97,020,000	100	106,722,000	300	291,942,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.05.201.01	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	∑ dokumen hasil penguatan kelembagaan Keamanan Pangan Segar yang dibuat	N/A	0	-	10	-	10	-	0	-	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.05.201.03	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	∑ dokumen Registrasi terbit dan dokumen pengawasa Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	38	10	65,000,000	10	71,500,000	10	78,650,000	30	215,150,000	Bidang Ketahanan Pangan	
02.09.05.201.05	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jenis	∑ Jenis Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan PSAT	N/A	2	23,200,000	2	25,520,000	2	28,072,000	6	76,792,000	Bidang Ketahanan Pangan	
3:27:02	Meningkatnya kualitas dan penyediaan Sarana Pertanian	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan penyediaan Sarana Pertanian</b>	%	<b>(Jumlah penyediaan alsintan s.d tahun N) dikurangi ( jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022) dibagi jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022 dikali 100</b>	0	3	Rp 6,848,800,000	4.5	Rp 10,511,240,000	6	Rp 8,462,364,000	6	25,822,404,000	Bidang Ketahanan Pangan	
			<b>Persentase peningkatan varietas baru bersertifikat</b>	%	<b>Jumlah varietas baru bersertifikat s.d tahun N dibagi jumlah varietas baru bersertifikat yang ditargetkan dikali 100</b>	53	33		67		100		100	-	Bidang Ketahanan Pangan	
03.27.02.021	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dibuat</b>	%	<b>Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dibagi kegiatan pengawasan yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 5,031,400,000	100	Rp 5,512,100,000	100	Rp 6,063,310,000	300	16,606,810,000	Bidang Ketahanan Pangan	
03.27.02.021.01	Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	∑ Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi yang dibuat	8	14	Rp 4,801,000,000	14	Rp 5,258,660,000	14	Rp 5,784,526,000	42	15,844,186,000		
03.27.02.021.02	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	∑ Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	1	Rp 230,400,000	7	Rp 253,440,000	7	Rp 278,784,000	15	762,624,000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
					yang dibuat											
03.27.02.022	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Fasilitas pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan</b>	%	<b>Jumlah fasilitas pengelolaan SDG yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitas pengelolaan SDG yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 800,000,000	100	Rp 880,000,000	100	Rp 968,000,000	300	2,648,000,000	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan	
03.27.02.022.01	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	∑ Varietas Unggulan Baru (VUB) yang dilepas	2	5	Rp 600,000,000	5	Rp 660,000,000	5	Rp 726,000,000	15	1,986,000,000	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan	
03.27.02.022.02	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	∑ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman	4	5	Rp 200,000,000	11	Rp 220,000,000	11	Rp 242,000,000	27	662,000,000	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan	
03.27.02.023	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitas Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan yang dilaksanakan</b>	%	<b>Jumlah fasilitas peningkatan mutu dan peredaran yang dilaksanakan dibagi fasilitas peningkatan mutu yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 60,000,000	100	Rp 66,000,000	100	Rp 72,600,000	300	198,600,000	Bidang Peternakan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan	
03.27.02.023.01	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	5	Rp 35,000,000	2	Rp 38,500,000	2	Rp 42,350,000	9	115,850,000	Bidang Peternakan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan	
03.27.02.023.02	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	N/A	5	Rp 25,000,000	1	Rp 27,500,000	1	Rp 30,250,000	7	82,750,000	Bidang Peternakan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencanaan (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															n	
03.27.02.025	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitas pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak dan HPT</b>	%	<b>Jumlah fasilitas pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan dibagi fasilitas pengendalian dan pengawasan yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 932,400,000	100	Rp 4,025,640,000	100	Rp 1,328,204,000	300	6,286,244,000	Bidang Peternakan	
03.27.02.025.01	Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	∑ Benih / Bibit Ternak kambing yang beredar	3000	3,000	Rp 932,400,000	3,000	Rp 1,025,640,000	3,000	Rp 1,128,204,000	9000	3,086,244,000	Bidang Peternakan	
03.27.02.025.02	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	dokumen	∑ dokumen Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	N/A	-	Rp -	-	-	-	#VALU E!	-	-	Bidang Peternakan	
03.27.02.025.03	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor	∑ Ternak Sapi dan kerbau yang terfasilitasi penandaan	1343	-	Rp -	1,100	Rp -	1,100	Rp -	2200	-	Bidang Peternakan	
03.27.02.025.06	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	∑ Laporan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	N/A	1	Rp 3,000,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	2	3,200,000,000	Bidang Peternakan	
03.27.02.026	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang didistribusikan	%	<b>Jumlah benih bibit ternak dan HMT yang didistribusikan dibagi jumlah benih bibit ternak dan HMT yang direncanakan dikali 100</b>	N/A	100	Rp 25,000,000	100	Rp 27,500,000	100	Rp 30,250,000	300	82,750,000	Bidang Peternakan	
03.27.02.026.01	Terlaksananya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	N/A	-	Rp -	200	Rp -	200	Rp -	#VALU E!	-	Bidang Peternakan	
03.27.02.026.02	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ton	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	N/A	0.5	Rp 25,000,000	0.5	Rp 27,500,000	0.5	Rp 30,250,000	1.5	82,750,000	Bidang Peternakan	
3:27:03	Meningkatnya kualitas Prasarana Pertanian	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun</b>	%	<b>(jumlah prasarana yang dibangun sampai dengan tahun N) dikurangi (Jumlah prasarana s.d 2022) dibagi Jumlah prasarana s.d 2022 (792)</b>	5	7.07	Rp 4,671,600,000	11.11	Rp 5,138,760,000	15.66	Rp 5,168,636,000	15.66	14,978,996,000		
03.27.03.201	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang difasilitasi</b>	%	<b>jumlah prasarana pertanian yang difasilitasi dibagi jumlah prasarana pertanian yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 371,600,000	100	Rp 408,760,000	100	Rp 449,636,000	100	1,229,996,000		
03.27.03.201.	Terkelolanya Lahan Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan	dokumen	∑ dokumen	1	1	Rp	1	Rp	1	Rp	3			

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		rekomendasi LP2B yang diterbitkan			271,600,000		298,760,000		328,636,000		898,996,000		
03.27.03.201.03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	∑ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	1	Rp 100,000,000	1	Rp 110,000,000	1	Rp 121,000,000	3	331,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Bidang Peternakan	
03.27.03.201.04	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	dokumen	∑ dokumen Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan yang dibuat	N/A		Rp -	1				1	-	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun / direhab</b>	%	<b>Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun dan direhab dibagi jumlah prasarana pertanian yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 4,300,000,000	100	Rp 4,730,000,000	100	Rp 4,719,000,000	100	13,749,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.01	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi Usaha tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Jaringan Irigasi yang dibangun	506	8	Rp 1,150,000,000	8	Rp 1,265,000,000	8	Rp 1,391,500,000	24	3,806,500,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.02	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Embung pertanian yang dibangun	22		Rp -		Rp -		Rp -	0	-	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.03	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Jalan Usaha Tani yang dibangun	96	6	Rp 950,000,000	6	Rp 1,045,000,000	6	Rp 1,149,500,000	18	3,144,500,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.04	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Dam Parit yang dibangun	102		Rp -		Rp -		Rp -	0	-	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.06	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Pintu Air yang dibangun	57		Rp -		Rp -		Rp -	0	-	Bidang Prasarana, Sarana dan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencanaan (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.07	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Rumah Potomng Hewan (RPH ) yang direhab	8	1	Rp 800,000,000	1	Rp 880,000,000	1	Rp 484,000,000	3	2,164,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.08	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	∑ Balai Penyuluh Pertanian (BPP ) yang direhab	1	1	Rp 400,000,000	1	Rp 440,000,000	1	Rp 484,000,000	3	1,324,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.03.202.09	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun, direhab dan dipelihara.	unit	∑ Puskesmas yang direhab	1	40	Rp 1,000,000,000	20	Rp 1,100,000,000	20	Rp 1,210,000,000	80	3,310,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
3:27:04	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)</b>	%	<b>Jumlah hasil pemerikasaan produksi ternak yang aman konsumsi dibagi jmlah produksi ternak yang diperiksa dikali 100</b>	90	100	Rp 1,588,600,000	100	Rp 1,731,300,000	100	Rp 1,865,330,000	100	5,185,230,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.04.201	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</b>	%	<b>Jumlah fasilitas pengobatan ternak dibagi jumlah fasilitas yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 200,000,000	100	Rp 220,000,000	100	Rp 242,000,000	100	662,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.04.201.01	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5	3	Rp 200,000,000	3	Rp 220,000,000	3	Rp 242,000,000	9	662,000,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
03.27.04.203	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan</b>	%	<b>Jumah laporan pelayanan jasa medik yang difasilitasi dibagi Jumlah laporan pelayanan jasa medik yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 688,000,000	100	Rp 756,800,000	100	Rp 832,480,000	100	2,277,280,000	Bidang Peternakan	
03.27.04.203.02	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	∑ Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berbasis UPT Puskesmas yang dibuat	1	4	Rp 688,000,000	4	Rp 756,800,000	4	Rp 832,480,000	12	2,277,280,000	Bidang Peternakan	
03.27.04.204	Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase fasilitas Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis</b>	%	<b>Jumlah laporan penerapan dan pengawasan</b>	100	100	Rp 305,000,000	100	Rp 333,500,000	100	Rp 364,850,000	100	1,003,350,000	Bidang Peternakan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	<b>Veteriner</b>	<b>Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>persyaratan teknis kesmavet yang difasilitasi dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan dikali 100</b>											
03.27.04.204. 01	Terlaksananya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	∑ Laporan hasil pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan yang dibuat	2	4	Rp 285,000,000	4	Rp 313,500,000	4	Rp 344,850,000	12	943,350,000	Bidang Peternakan	
03.27.04.204. 02	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	∑ Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan yang dibuat	12	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	36	30,000,000	Bidang Peternakan	
03.27.04.204. 04	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	∑ Laporan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibuat	1	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	3	30,000,000	Bidang Peternakan	
03.27.04.205	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Persentase Pengawasan Unit Usaha Kesrawan</b>	%	<b>Jumlah unit usaha kesrawan (RPH) yang diawasi dibagi jumlah unit usaha kesrawan yang ada dikali 100</b>	100	100	Rp 395,600,000	100	Rp 421,000,000	100	Rp 426,000,000	100	1,242,600,00 0	Bidang Peternakan	
03.27.04.205. 01	Terlaksananya Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	∑ Laporan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan yang dibuat	12	12	Rp 395,600,000	12	Rp 421,000,000	12	Rp 426,000,000	36	1,242,600,00 0	Bidang Peternakan	
3:27:05	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Luasan serangan OPT dan bencana pertanian yang ditangani</b>	%	<b>(Jumlah luasan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang ditangani) ditambah (jumlah luasan bencana pertanian yang ditangani) dibagi (jumlah luasan serangan OPT) ditambah (luasan bencana pertanian) dikali 100</b>	100	100	Rp 250,000,000	100	Rp 275,000,000	100	Rp 302,500,000	100	827,500,000	Bidang Peternakan	
03.27.05.201	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan</b>	%	<b>Jumlah Luasan serangan OPT yang difasilitasi dibagi jumlah luasan serangan OPT dikali 100</b>	100	100	Rp 250,000,000	100	Rp 275,000,000	100	Rp 302,500,000	100	827,500,000	Bidang Peternakan	
03.27.05.201. 01	Terkendalinya Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	∑ Luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang difasilitasi	5	100	Rp 250,000,000	100	Rp 275,000,000	100	Rp 302,500,000	300	827,500,000	Bidang Peternakan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencanaan (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
03.27.05.201. 05	Tertunggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	∑ Laporan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	N/A		Rp -		Rp -		Rp -	0	-	Bidang Peternakan , Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultur a, Bidang Perkebuna n	
3:27:07	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian</b>	%	<b>((Jumlah kelompok tani yang naik kelas s.d tahun N dibagi jumlah poktan data awal 2022 dikali 100) ditambah (Jumlah PPL yang naik kelas s.d tahun N dibagi jumlah PPL data awal dikali 100)) dibagi 2</b>	5	5	Rp 988,350,000	10	Rp 1,087,185,00 0	15	Rp 1,195,903,50 0	15	3,271,438,50 0	Bidang Peternakan , Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultur a, Bidang Perkebuna n	
03.27.07.201	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan</b>	%	<b>Jumlah Fasilitasi penyuluhan pertanian dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 988,350,000	100	Rp 1,087,185,00 0	100	Rp 1,195,903,50 0	100	3,271,438,50 0	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultur a, Bidang Perkebuna n	
03.27.07.201. 01	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	∑ Kelembagaan Penyuluhan (BPP) yang difasilitasi	21	21	Rp 479,300,000	21	Rp 527,230,000	21	Rp 579,953,000	21	1,586,483,00 0	Bidang Peternakan , Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultur a, Bidang Perkebuna n	
03.27.07.201. 02	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	∑ Kelembagaan Petani yang difasilitasi	1124	1138	Rp 446,050,000	1138	Rp 490,655,000	1138	Rp 539,720,500	1138	1,476,425,50 0	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluha n Pertanian	
03.27.07.201. 03	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	∑ fasilitasi Sarana dan prasarana penyuluhan	10	21	Rp 63,000,000	21	Rp 69,300,000	21	Rp 76,230,000	21	208,530,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluha n Pertanian	
03.27.07.201. 05	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	∑ Sekolah Lapang yang terfasilitasi	25		Rp -		Rp -		Rp -	0	-	Bidang Prasarana, Sarana dan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota													Penyuluhan Pertanian	
1:09:01	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	%	<b>Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 17,617,958,8 14	100	Rp 19,355,171,1 61	100	Rp 21,365,688,2 77	100	58,338,818,2 51	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
01.09.01.201	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	%	<b>Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100</b>	100	100	Rp 6,000,000	100	Rp 6,600,000	100	Rp 7,260,000	100	19,860,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
01.09.01.201. 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	$\sum$ dokumen dokumen Renstra, dokumen P Renstra, dokumen Renja, dokumen P Renja	2	2	Rp 3,000,000	3	3,300,000	2	3,630,000	7	9,930,000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	
01.09.01.201. 02	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA- SKPD	dokumen	$\sum$ dokumen RKA SKPD	1	1	Rp 3,000,000	1	3,300,000	1	3,630,000	3	9,930,000	Sekretariat	
01.09.01.201. 03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	$\sum$ dokumen Perubahan RKA SKPD, dokumen Pergeseran RKA SKPD	2	2	-	2	-	2	-	6	-	Sekretariat	
01.09.01.201. 06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	$\sum$ Laporan LKjIP Tahunan, Laporan LKjIP TW I, Laporan LKjIP TW II, Laporan LKjIP TW III, Laporan LKjIP TW IV	5	5	-	5	-	5	-	15	-	Sekretariat	
01.09.01.201. 07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	$\sum$ Laporan Evaluasi Renja TW I, TW II, TW III, TW IV/Laporan Evaluasi Interim TW I, II,III,IV/Laporan IKM TW I, TW II, TW III, TW	20	20	-	20	-	20	-	60	-	Sekretariat	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencanaan (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
					IV/LaporanEvaluasi DAK TW I, II, III, IV/Laporan Evaluasi DBHCHT I,II,III,IV/											
01.09.01.202	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	Jumlah fasilitas administrasi keuangan yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi keuangan yang direncanakan dikali 100	100	<b>100</b>	<b>Rp 15,101,336,5 94</b>	<b>100</b>	<b>Rp 16,611,470,2 53</b>	<b>100</b>	<b>Rp 18,272,617,2 79</b>	100	49,985,424,1 26	Sekretariat	
01.09.01.202. 01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bula n	∑ ASN yang mendapat Gaji dan tunjangan Bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei Juni, Juli Agt, Sep, Okt, Nop, Des	181/12	178/12	Rp 15,032,720,5 94	178/12	16,535,992,6 53	178/12	18,189,591,9 19	178/36	49,758,305,1 66	Sekretariat	
01.09.01.202. 02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	∑ dokumen pelaksanaan tugas ASN Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	12	12	Rp 59,616,000	12	65,577,600	12	72,135,360	36	197,328,960	Sekretariat	
01.09.01.202. 05	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	∑ Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1	1	Rp 4,000,000	1	4,400,000	1	4,840,000	3	13,240,000	Sekretariat	
01.09.01.202. 07	Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	laporan	∑ Laporan keuangan bulanan, laporan triwulan, dan Laporan semester	18	12	Rp 5,000,000	12	5,500,000	12	6,050,000	36	16,550,000	Sekretariat	
01.09.01.203	Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	%	Jumlah fasilitas administrasi BMD yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi BMD yang direncanakan dikali 100	100	<b>100</b>	<b>Rp 22,348,668</b>	<b>100</b>	<b>Rp -</b>	<b>100</b>	<b>Rp -</b>	100	22,348,668	Sekretariat	
01.09.01.203. 01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	∑ dokumen RKBMD, dokumen RKBMD Perubahan	2	2	-	2	-	2	-	6	-	Sekretariat	
01.09.01.203. 02	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dokumen	∑ dokumen pengamanan barang milik daerah	1	1	Rp 22,348,668					1	22,348,668	Sekretariat	
01.09.01.203. 06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	∑ Laporan penatausahaan BMD Bulan Januari sd Desember	12	12		12	-	12	-	36	-	Sekretariat	
01.09.01.205	Terpenuhinya administrasi	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase fasilitas</b>	%	Jumlah fasilitas	100	<b>100</b>	<b>Rp</b>		<b>Rp</b>	<b>100</b>	<b>Rp</b>	100		Sekretariat	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
	kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian PD</b>		administrasi kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian yang direncanakan dikali 100			-	100	-	75,000,000		75,000,000			
01.09.01.205.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	∑ paket pakaian dinas	N/A					1	75,000,000	1	75,000,000		
01.09.01.205.03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	∑ dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bulan Januari, Feb, Maret, Apr, Mei, Juni, Juli, Agt, Sep, Okt, Nop, Des,	12	12		12	-	12		36	-	Sekretariat	
01.09.01.206	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Umum PD</b>	%	Jumlah fasilitas administrasi umum yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum yang direncanakan dikali 100	100	100	Rp 380,541,252	100	Rp 417,595,377	100	Rp 459,354,915	100	1,257,491,544	Sekretariat	
01.09.01.206.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	∑ Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	10	Rp 14,950,812	10	16,445,893	10	18,090,483	30	49,487,188		
01.09.01.206.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	∑ Paket penyediaan logistik Kantor (bahan dan peralatan)	2	3	Rp 149,752,320	3	164,727,552	3	181,200,307	9	495,680,179	Sekretariat	
01.09.01.206.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	∑ Paket Penyediaan barang cetakan serta proses penggandaan	1	1	Rp 59,360,120	1	65,296,132	1	71,825,745	3	196,481,997	Sekretariat	
01.09.01.206.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	∑ Penyediaan bahan bacaan	N/A	1		1	-	1	-	3	-	Sekretariat	
01.09.01.206.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	∑ Paket Penyediaan bahan/material lainnya	1	1	Rp 5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	3	16,550,000	Sekretariat	
01.09.01.206.08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	∑ Laporan fasilitas penerimaan kunjungan tamu	1	1		1	-	1	-	3	-	Sekretariat	
01.09.01.206.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	∑ Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	3	3	Rp 151,478,000	3	165,625,800	3	182,188,380	9	499,292,180	Sekretariat	
01.09.01.207	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pengadaan BMD</b>	%	Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang terpenuhi di bagi Jumlah fasilitas pengadaan BMD yang direncanakan dikali 100	100	100	Rp -	100	Rp 1,000,000	100	Rp 1,100,000	100	2,100,000	Sekretariat	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal Tahun Perencana an (2022)	Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka si
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
01.09.01.207. 10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	$\Sigma$ unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	2		2	Rp 1,000,000	2	1,100,000	6	2,100,000	Sekretariat	
01.09.01.208	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	%	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100	100	Rp <b>1,858,016,000</b>	100	Rp <b>2,043,817,600</b>	100	Rp <b>2,248,199,360</b>	100	6,150,032,960	Sekretariat	
01.09.01.208. 01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	$\Sigma$ Laporan penyediaan jasa surat menyurat bulan januari sd Desember	12	12	Rp 3,000,000	12	3,300,000	12	3,630,000	36	9,930,000	Sekretariat	
01.09.01.208. 02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	$\Sigma$ Laporan penyediaan jasa telepon/internet, air, listrik bulan Januari sd Desember	12	12	Rp 419,040,000	12	460,944,000	12	507,038,400	36	1,387,022,400	Sekretariat	
01.09.01.208. 04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	$\Sigma$ Laporan fasilitas jasa pelayanan umum kantor	12	12	Rp 1,435,976,000	12	1,579,573,600	12	1,737,530,960	36	4,753,080,560	Sekretariat	
01.09.01.209	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	%	Jumlah fasilitas pemeliharaan BMD yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitas pemeliharaan BMD yang direncanakan dikali 100	100	100	Rp <b>249,716,300</b>	100	Rp <b>274,687,930</b>	100	Rp <b>302,156,723</b>	100	826,560,953	Sekretariat	
01.09.01.209. 01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	$\Sigma$ pemeliharaan dan rehabilitasi unit kendaraan dinas perorangan/jabatan (termasuk di dalamnya jasa perizinan kendaraan)	8	163	Rp 220,026,300	163	241,028,930	163	265,131,823	163	726,187,053	Sekretariat	
01.09.01.209. 02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	$\Sigma$ pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan dinasoperasional/lapangan (termasuk di dalamnya jasa perizinan kendaraan)	14	87	Rp 29,690,000	87	32,659,000	87	35,924,900	261	98,273,900	Sekretariat	
01.09.01.209. 06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	$\Sigma$ pemeliharaan peralatan dan peralatan mesin lainnya, termasuk yang digunakan dli kantor dan rumah dinas/jabatan (contoh	1	4	Rp -	4	1,000,000	4	1,100,000	12	2,100,000	Sekretariat	

## **BAB VII. KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **7.1 Penentuan target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026**

Indikator Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Adapun Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan industri	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	Data BPS	6,522.69	6,686.83	6,712.45	6,738.06	6,738.06
1.1	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Data Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Susenas BPS	95.3	95.49	95.68	95.87	95.87
1.2	2. Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.002	0.003	0.004	0.004
		2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.003	0.0045	0.006	0.006
		3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.02	0.03	0.04	0.04
		4. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.04	0.06	0.08	0.08

## **7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Adapun proyeksi capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 disajikan dalam Tabel T-C 28, sebagai berikut :

**Tabel 7.2 T-C 28. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan industri	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Miliar Rupiah	Data BPS	6,522.69	6,686.83	6,712.45	6,738.06	6,738.06
1.1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Data Aplikasi Harmonisasi Analisis PPH Susenas BPS	95.3	95.49	95.68	95.87	95.87
A	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	%	$\sum$ infrastruktur lumbung pangan yang dibangun tahun N ditambah jumlah infrastruktur lumbung pangan s.d N-1 dibagi jumlah kebutuhan infrastruktur lumbung pangan dikali 100	N/A	31.82	32.32	32.83	37.37
B	Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Angka Kecukupan Energi	kkal per kapita per hari	$\sum$ Nilai Angka Kecukupan Energi (data Susenas BPS)	N/A	2122.56	2133.12	2143.68	2143.68
C	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	Jumlah penanganan wilayah cukup rentan, rentan dan sangat rentan rawan pangan dibagi jumlah wilayah wilayah cukup rentan, rentan dan sangat rentan rawan pangan dikali 100	100	100	100	100	100
D	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	%	Jumlah sample pangan segar asal tumbuhan yang aman di bagi jumlah sample pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa dikali 100	100	100	100	100	100
1.2	Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Persentase Peningkatan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.002	0.003	0.004	0.004

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Produksi Tanaman Pangan							
		2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.003	0.0045	0.006	0.006
		3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.02	0.03	0.04	0.04
		4. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	(Jumlah produksi tahun N dikurangi jumlah produksi capaian 2022) dibagi jumlah capaian 2022 dikali 100	N/A	0.04	0.06	0.08	0.08
A	Meningkatnya kualitas dan penyediaan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan Sarana Pertanian	Kw/Ha	(Jumlah penyediaan alsintan s.d tahun N) dikurangi (jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022) dibagi jumlah alsintan data sampai dengan tahun 2022 dikali 100	0	3	4.5	6	6
		Persentase peningkatan varietas baru bersertifikat	Kw/Ha	Jumlah varietas baru bersertifikat s.d tahun N dibagi jumlah varietas baru bersertifikat yang ditargetkan dikali 100	57	33	67	100	100
B	Meningkatnya kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun	%	(jumlah prasarana yang dibangun sampai dengan tahun N) dikurangi (Jumlah prasarana s.d 2022) dibagi Jumlah prasarana s.d 2022 (792)	5	6.57	13.13	19.57	19.57
C	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Persentase produksi ternak yang aman	%	Jumlah hasil pemeriksaan produksi ternak yang aman konsumsi dibagi jmlah produksi ternak yang diperiksa dikali 100	90	100	100	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat Veteriner	konsumsi (daging, susu, telur)							
D	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luasan serangan OPT dan bencana pertanian yang ditangani	%	(Jumlah luasan seranagn organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang ditangani) ditambah (jumlah luasan bencana pertanian yang ditangani) dibagi (jumlah luasan serangan OPT) ditambah (luasan bencana pertanian) dikali 100	100	100	100	100	100
E	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	%	((Jumlah kelompok tani yang naik kelas s.d tahun N dibagi jumlah poktan data awal 2022 dikali 100) ditambah (Jumlah PPL yang naik kelas s.d tahun N dibagi jumlah PPL data awal dikali 100)) dibagi 2	5	5	10	15	15
	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII. PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang akan menjadi acuan di dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun tiga tahun mendatang untuk memacu pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta peningkatan perekonomian daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun dengan acuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih terukur dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini, tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder yang berkecimpung dalam urusan pangan dan pertanian. Selain itu dengan mempertimbangkan kondisi serta permasalahan maka perubahan rencana strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang disusun, dengan harapan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Lumajang, Mei 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN



Ir. HAIRIL DIANI, M.Si  
NIP. 19660922 199202 1 001